BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala bidang kehidupan manusia, salah satu segmen yang diatur dalam Islam adalah masalah keluarga. Dalam konteks keluarga menurut Islam, dijelaskan keluarga merupakan unit dasar dan tahapan pertama dalam struktur sosial masyarakat. Keluarga diartikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari pria dan wanita yang saling terikat secara emosional, sosial, dan finansial, yang diatur oleh adanya hak serta kewajiban, serta peran seorang suami sebagai pemimpin (*qiwamah rijal*) yang menangani semua urusan, berdasarkan prinsip dan ketentuan syariat.¹

Keluarga merupakan struktur terkecil dalam komunitas yang berfungsi sebagai tempat pertama dalam pembentukan karakter dan pribadi seseorang. Harmoni dalam keluarga merupakan kunci utama bagi terciptanya kesejahteraan emosional, sosial, dan ekonomi anggota keluarga. Dalam berkeluarga tentunya kita ingin mewujudkan keluarga yang *sakinah*, dan hal ini yang dianggap sebagai elemen penting untuk meraih kebahagiaan dalam keluarga. Dalam perspektif Islam, yang dijelaskan dalam Al-Quran, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan suasana *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana disebutkan

¹ BPKK DPP PKS, *Buku Pendidikan Keluarga* (Jakarta, 2019), 7.

dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat ini mengungkapkan bahwa istilah *sakinah* dalam Al-Quran merujuk pada keharmonisan dalam sebuah keluarga. Keluarga yang tenteram berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) antara pasangan suami dan istri, selanjutnya tumbuh menjadi kasih sayang (*rahmah*) di tengah-tengah semua individu keluarga, yang dapat menciptakan suasana tenang dan damai dalam kehidupan.²

Keluarga adalah bagian dasar dari masyarakat yang memiliki peran krusial dalam menjadikan identitas seseorang serta dalam menjaga kestabilan sosial secara keseluruhan. Tidak hanya sebagai unsur utama terbentuknya masyarakat, keluarga juga memiliki peran strategis dalam memperkuat bangunan sosial suatu bangsa. Jadi, ketahanan keluarga dinilai sebagai modal penting untuk membentuk ketahanan nasional. Dalam konteks ini, perkawinan menjadi pintu gerbang awal pembentukan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Idealnya, keluarga berfungsi sebagai ruang aman, damai, dan menyenangkan bagi semua anggotanya. Dalam keluarga yang sejahtera, terdapat suasana kasih

² Aan Rohana dan Tim, *Membangun Keluarga Sakinah Dan Sejahtera* (Bidang Kewanitaan DPP PKS, 2004), 18.

sayang, penghargaan, dan perlindungan satu dengan yang lainnya. Hubungan pasangan suami istri bukan hanya bersifat resmi, namun bisa juga menjadi dasar emosional serta spiritual untuk menciptakan rumah tangga yang seimbang. Tetapi, kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa tidak semua rumah tangga dapat mencapai kondisi sempurna itu.

Beraneka ragam konflik internal, ketidakseimbangan peran, serta masalah ekonomi dan sosial sering kali menjadi rintangan dalam upaya membangun keluarga yang harmonis. Ketidakharmonisan ini pada akhirnya dapat memiliki konsekuensi yang serius, tidak hanya untuk kesejahteraan anggota keluarga, tetapi juga untuk tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka bisa berujung pada konflik dalam rumah tangga.

Konflik dalam lingkungan keluarga melibatkan interaksi yang rumit antara suami, istri dan anak-anak. Jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, dampaknya bisa sangat berat, tidak hanya bagi anggota keluarga, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Berbagai jenis masalah bisa muncul, seperti kekerasan dalam rumah tangga, gangguan perkembangan anak, ketidakstabilan finansial, dan masalah komunikasi. Semua ini dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan bahkan berujung pada perceraian. Dalam banyak situasi, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, baik secara fisik maupun mental. Tingginya angka perceraian juga menjadi indikator nyata yang menunjukkan bagaimana konflik dalam keluarga dapat mengancam kestabilan sosial di masyarakat yang lebih luas.

Kita pahami bahwa tidak semua konflik memiliki sifat dan penyelesaian yang sama. Secara umum, konflik keluarga terbagi menjadi dua tipe, yaitu *solvable conflict* (konflik yang dapat diselesaikan) dan *perpetual conflict* (konflik yang berlangsung terus menerus). *Solvable conflict* adalah konflik jangka pendek yang biasanya bersifat ringan, seperti perbedaan pendapat dalam memilih tempat liburan atau menentukan warna cat rumah. Akar permasalahannya mudah diidentifikasi dan disepakati bersama, sehingga keluarga dapat menemukan jalan keluar dengan relatif cepat. Konflik ini cenderung tidak meninggalkan bekas emosional yang dalam, karena penyelesaiannya dapat dicapai dengan kompromi dan komunikasi terbuka.

Berbeda halnya dengan *perpetual conflict*, yang merupakan konflik jangka panjang dan lebih sulit diselesaikan karena menyentuh aspek pribadi, seperti nilai-nilai kehidupan, karakter, tradisi, atau keyakinan yang dianut oleh setiap anggota keluarga. Konflik jenis ini kerap muncul berulang kali dalam berbagai konteks, meskipun masalah spesifik yang dihadapi berbeda. Misalnya, ketika seorang anak yang introvert enggan mengikuti kegiatan keluarga besar, hal ini bisa menjadi sumber ketegangan tersendiri bagi orang tua yang mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh anggota keluarga. Ketegangan yang sama dapat muncul kembali dalam situasi lain, seperti saat orang tua ingin memajang foto keluarga di media sosial. Dalam kasus seperti ini, penyelesaian bukan berarti menghilangkan konflik sepenuhnya, melainkan membangun pemahaman, toleransi dan strategi komunikasi

yang sehat agar konflik tidak merusak keharmonisan keluarga.³

Dari beberapa tipe konflik dalam keluarga ada yang bisa diselesaikan sendiri dalam keluarga, ada pula konflik yang memerlukan orang lain atau lembaga dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan sejumlah contoh yang sering muncul dalam masyarakat, terutama di Kota Banjarmasin, dampak kekerasan dalam rumah tangga bisa menyebabkan rasa sakit dan tantangan yang bersifat fisik, seksual, emosional, finansial, serta juga pengabaian.⁴ Keadaan ini tentu sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan penanggulangan serius dari pemerintah maupun masyarakat guna mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, dibutuhkan kajian mendalam tentang mekanisme penyelesaian konflik keluarga yang efektif dan berkeadilan, khususnya yang melibatkan institusi pemerintah.

Sebagai usaha untuk mengatasi pertikaian dalam keluarga dan memberikan keamanan kepada wanita serta anak yang berulang ulang menjadi korban, pemerintah telah mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA ini bertugas menyediakan layanan perlindungan, mediasi, pendampingan hukum, konseling psikologis, serta rehabilitasi sosial bagi

³ Amanda Teonata, S.Psi., "Jenis dan Manfaat Konflik Keluarga," 2022, <https://ucmfc.ciputra.ac.id/jenis-dan-manfaat-konflik-keluarga/>.

⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, "Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan di Kota Banjarmasin Tahun 2023," 22 Oktober 2024, <https://satudata.banjarmasinKota.go.id/data-statistik/e778834d-25ac-4012-bd0d-0048bb1cf730>.

para pihak yang terkait dalam konflik, terutama perempuan dan anak yang sering menjadi korban.

UPTD PPA Kota Banjarmasin memiliki visi: menuju kehidupan yang bermartabat dan terhormat bagi perempuan dan anak di Kota Banjarmasin. Sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan meliputi; 1. Penyebarluasan informasi 2. Pendampingan psikologis, advokasi hukum, serta pemulihan kesehatan dalam rumah tangga, 3. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak. Sebagai fondasi penguatan peran perempuan dan anak, maka secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, mempunyai tujuan untuk: 1. Memberikan perlindungan perempuan serta perlindungan anak, 2. Memberikan pelayanan masyarakat yang mendapatkan masalah sosial kemasyarakatan bagi perempuan dan anak, menuju kesetaraan dan keadilan gender.⁵

Berdasarkan data UPTD PPA Kota Banjarmasin, dengan jumlah penduduk mencapai 678.240 jiwa pada Desember 2023, tercatat sebanyak 513 kasus konflik keluarga dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023 saja, terdapat 132 kasus yang dilaporkan, yang mencakup 47 perempuan, 30 anak laki-laki dan 55 anak perempuan sebagai korban. Salah satu bentuk konflik keluarga yang paling mendapat perhatian adalah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak. Mereka sering kali menjadi pihak paling rentan, baik secara fisik, psikologis,

⁵ [uptdppa_banjarmasin](https://www.instagram.com/p/C-7OE-zPJvm/?img_index=2&igsh=eWRpOG51aGZ5Ynpq), "Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin," Instagram, *UPTD-PPA Kota Banjarmasin* (blog), 21 Agustus 2024, https://www.instagram.com/p/C-7OE-zPJvm/?img_index=2&igsh=eWRpOG51aGZ5Ynpq.

maupun ekonomi. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang melibatkan perempuan dan anak, masih merupakan persoalan di Kota Banjarmasin.⁶

Selain itu, informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperlihatkan bahwa jumlah kejadian kekerasan yang menimpa perempuan dan anak mengalami tren kenaikan tahunan. Kejadian ini menunjukkan kebutuhan untuk penanganan yang lebih sistematis dan terintegrasi terhadap konflik dalam keluarga. Hal ini menjadi dasar penting untuk memperkuat peran lembaga seperti UPTD PPA dalam memberikan perlindungan serta usaha penyelesaian terhadap isu kekerasan dan konflik keluarga.⁷

Sebagaimana dalam pasal 3,4 dan 5 Peraturan Menteri PPA RI Nomor 4 tahun 2018 Kedudukan UPTD PPA dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA juga berfungsi memberikan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan

⁶ [uptdppa_banjarmasin](#).

⁷ Komnas Perempuan, “Laporan Tahunan Hasil Kerja Komnas Perempuan Tahun 2023 - Menyiapkan Langkah ke Depan,” 2023, <https://komnasperempuan.go.id/laporan-kelembagaan-detail/laporan-tahunan-hasil-kerja-komnas-perempuan-tahun-2023-menyiapkan-langkah-ke-depan>.

pendampingan korban.⁸

Bisa kita katakan bahwa penyelesaian konflik melalui UPTD PPA melakukan pendekatan nonlitigasi atau di luar pengadilan, yang lebih cepat, murah, dan bersifat kekeluargaan. Beberapa metode penanganan konflik keluarga yang diterapkan UPTD PPA meliputi:

1. Mediasi, hal ini dilakukan untuk menangani perselisihan antara pasangan suami istri, konflik antar anggota keluarga, hingga perselisihan terkait hak asuh anak, tanpa perlu membawa kasus ke meja hijau. Mediasi menawarkan kesempatan bagi para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara damai, tanpa tekanan yang sering terjadi dalam proses hukum formal. Dalam konteks konflik keluarga, mediasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan hubungan antara anggota keluarga.⁹
2. Konseling Psikologis, UPTD PPA menyediakan layanan konseling bagi anggota keluarga yang terlibat konflik untuk membantu mereka memahami masalah yang dihadapi, mengelola emosi, dan membangun komunikasi yang lebih baik. Konseling ini tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga untuk memperkuat ikatan dalam keluarga.
3. Pendampingan Hukum, dalam kasus yang lebih serius seperti kekerasan dalam

⁸ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak," 2018, 4–5, <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/245>.

⁹ Munir Fuady, *Teori dan Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020), 15–16.

rumah tangga atau penyimpangan hak-hak perempuan dan anak, UPTD PPA memberikan pendampingan hukum kepada korban. Pendampingan ini meliputi konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, hingga advokasi dalam proses litigasi jika diperlukan.

4. Rehabilitasi Sosial, bagi korban konflik keluarga, terutama perempuan dan anak yang mengalami trauma, UPTD PPA menyediakan layanan rehabilitasi sosial. Layanan ini mencakup terapi psikologis dan dukungan sosial untuk membantu korban memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih baik.¹⁰

Pendekatan nonlitigasi yang diterapkan oleh UPTD PPA bertujuan untuk menyelesaikan konflik keluarga secara damai, tanpa melalui proses pengadilan yang cenderung memerlukan waktu, biaya, dan energi yang besar. Pendekatan ini dinilai lebih humanis karena menitik beratkan pada pemulihan hubungan keluarga dan penyelesaian yang berkeadilan secara sosial. Dalam konteks masyarakat Kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik religius dan mayoritas beragama Islam, penyelesaian konflik juga tidak terlepas dari pertimbangan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang berkembang dan diterima secara sosial di lingkungan masyarakat setempat.¹¹

Di sisi lain, UPTD PPA dalam penyelesaian konflik keluarga sangat dipengaruhi oleh kebijakan lokal dan kerangka regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkuat arah kebijakan

¹⁰ Nurhikmah, Wawancara dengan Tenaga Ahli Hukum UPTD PPA Kota Banjarmasin, 16 Januari 2025.

¹¹ Nurhikmah.

serta peningkatan efisiensi layanan perlindungan bagi perempuan dan anak baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini sejalan dengan sasaran pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama dalam hal keadilan gender dan penguatan lembaga.

Evaluasi terhadap pelaksanaan peran UPTD PPA penting dilakukan guna mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta merumuskan strategi optimal dalam mendukung perlindungan keluarga di Kota Banjarmasin secara lebih komprehensif dan berkeadilan. Serta berbagai kendala yang dihadapi, Kendala tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya dukungan anggaran karena adanya pemangkasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi layanan UPTD PPA. Kendala-kendala ini berdampak pada efektivitas layanan dalam menangani konflik keluarga, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

Penelitian ini untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Nursyafe'i dan Chesa Syaqira Makmur. Penelitian Nursyafe'i fokus pada pengurusan konflik KDRT di UPTD PPA provinsi Jawa Barat dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, sedangkan Chesa meneliti pendampingan kasus kekerasan anak oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta selama pandemi. Berbeda dari kedua penelitian di atas, penelitian ini menyoroti peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan konflik keluarga secara umum, tidak terbatas pada kasus kekerasan tertentu maupun konteks pandemi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dari sisi wilayah, cakupan konflik yang

ditangani, serta pendekatan yang digunakan oleh UPTD PPA Kota Banjarmasin.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri, karena berupaya menganalisis secara mendalam peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan konflik keluarga melalui pendekatan nonlitigasi, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga memperhatikan konteks masyarakat religius dan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang ada di masyarakat. Di samping itu, penelitian ini ditujukan untuk mengenali tantangan yang ada dan merumuskan strategi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi layanan UPTD PPA. Diharapkan agar penelitian ini bisa memberi kontribusi baik dari sisi akademis maupun praktis dalam memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal, serta relevan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tentang keadilan gender dan penguatan lembaga.

Penelitian ini menerapkan metode Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan sumber hukum untuk menganalisis ketentuan hukum yang ada dan melihat kondisi nyata dalam masyarakat, di mana semua informasi didapatkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara menyeluruh peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam menangani dan menyelesaikan konflik keluarga, baik dalam aspek regulasi maupun pelaksanaan di lapangan. Penghimpunan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti petugas UPTD, korban, dan mediator, serta observasi partisipatif pada proses mediasi yang berlangsung, untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta

merumuskan rekomendasi dalam rekonstruksi kebijakan yang lebih efektif dan adil. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika hukum dan sosial dalam penyelesaian konflik sambil menilai efektivitas peran UPTD PPA dalam perspektif hukum perlindungan perempuan dan anak.

Di tengah keberadaan berbagai lembaga yang menangani isu perempuan dan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), keberadaan UPTD PPA memiliki posisi yang lebih dekat secara struktural dan fungsional dengan masyarakat daerah. Hal ini karena UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis yang berada langsung di bawah dinas daerah, sehingga lebih responsif, mudah diakses, dan mengetahui kondisi sosial budaya lokal secara lebih mendalam dibanding lembaga nasional seperti KPAI yang bersifat pengawasan makro dan kebijakan.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi UPTD PPA, termasuk di Kota Banjarmasin. Banyak kasus konflik keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan atau ditangani secara tidak tepat karena ketidaktahuan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya bisa membantu. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam tentang UPTD PPA, baik dari sisi peran, pendekatan penyelesaian konflik yang digunakan, maupun efektivitasnya dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai lembaga ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum

untuk perempuan dan anak, serta mendukung terbentuknya keharmonisan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, maka penulis mengambil penelitian berjudul “Peran UPTD PPA Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga ”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis menyampaikan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan konflik keluarga melalui pendekatan nonlitigasi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam penyelesaian konflik keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan konflik keluarga melalui pendekatan nonlitigasi,
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam menjalankan perannya terkait penyelesaian konflik keluarga. Dan Merumuskan strategi yang bisa dilaksanakan untuk mengoptimalkan peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam memberikan perlindungan serta menyelesaikan konflik keluarga secara efektif, humanis, dan berkeadilan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah diharapkan hasil penelitian mempunyai 2 fungsi yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dimaksudkan bisa meningkatkan wawasan dalam literatur tentang mekanisme penyelesaian konflik keluarga yang berbasis pada pendekatan nonlitigasi, seperti mediasi, konseling psikologis, dan pendampingan hukum. Selain itu, penelitian ini juga memberikan ilustrasi mengenai efektivitas peran UPTD PPA dalam menangani konflik keluarga secara lebih humanis dan berkeadilan.
- b. Kontribusi dalam kajian hukum keluarga dan perlindungan perempuan dan anak. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana hukum dan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak diimplementasikan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga.
- c. Mengevaluasi model penyelesaian konflik keluarga, dengan menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi UPTD PPA, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teori atau model baru dalam penyelesaian konflik keluarga secara nonlitigasi, yang lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum di Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa menghasilkan manfaat bagi berbagai pihak, terutama dalam meningkatkan efektivitas layanan UPTD PPA dalam menangani konflik keluarga, memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas peran UPTD PPA dalam menyelesaikan konflik keluarga, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan serta memperkuat kapasitas lembaga dalam menyediakan layanan mediasi, konseling, dan pendampingan hukum bagi masyarakat.
- b. Memberikan data empiris mengenai implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam konteks penyelesaian konflik keluarga, sehingga referensi dalam penyusunan atau revisi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani konflik keluarga, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi peran UPTD PPA.
- c. Memberikan informasi mengenai peran dan layanan yang disediakan oleh UPTD PPA, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat lebih mudah mengakses layanan yang tersedia, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik keluarga melalui mekanisme nonlitigasi yang lebih berdampak dan ramah bagi perempuan dan anak.
- d. Menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan

dengan penyelesaian konflik keluarga, peran lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta pendekatan nonlitigasi dalam konflik rumah tangga. serta Membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut terkait efektivitas kebijakan perlindungan perempuan dan anak di berbagai kota lainnya di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Secara bahasa kata “peran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai:

- a. Tingkah laku yang diharapkan dari seseorang dalam masyarakat sebagai akibat dari kedudukan sosialnya;
- b. Bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, film, dan sebagainya;
- c. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Secara umum, peran menunjuk pada fungsi, tugas, atau kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial atau konteks tertentu.¹²

Secara istilah di dalam kajian sosiologi, peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari individu yang berada pada posisi sosial tertentu. Peran mencerminkan sisi dinamis dari status sosial, apabila individu melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya dalam struktur sosial, maka ia menjalani

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>.

perannya. Peran juga mencerminkan pola-pola perilaku yang di internalisasi oleh individu sebagai pedoman bertindak dalam masyarakat.¹³

Dalam konteks penelitian ini, peran UPTD PPA diartikan sebagai fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh lembaga tersebut dalam proses penyelesaian konflik keluarga, baik dalam bentuk pelayanan langsung (konseling, mediasi), koordinasi antar lembaga, maupun pendampingan psikososial dan hukum kepada korban konflik keluarga.

Peran dalam penelitian ini merujuk pada fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga. Peran ini mencakup layanan mediasi, konseling psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial dalam aspek *preventif* (pencegahan), *kuratif* (penanganan), dan *rehabilitatif* (pemulihan). Sebagai bentuk intervensi terhadap permasalahan yang dihadapi keluarga, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

2. UPTD PPA

UPTD PPA adalah singkatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menghadapi masalah kekerasan atau isu lainnya, termasuk masalah dalam

¹³ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 212.

lingkungan keluarga.¹⁴

UPTD PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit ini menjalankan fungsi utama berupa pelayanan nonlitigasi guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan keluarga secara cepat, efektif, dan berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan korban.

3. Penyelesaian Konflik

Kata “konflik” sering dianggap sebagai pertikaian yang bersifat negatif yang mengganggu hubungan. Dalam konteks bahasa, konflik berkaitan erat dengan pertengkaran, perselisihan, dan pertikaian. Sedangkan penyelesaian konflik dalam penelitian ini mengacu pada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, baik yang bersifat interpersonal maupun struktural, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan atau kekerasan dalam keluarga. Penyelesaian ini dilakukan melalui pendekatan nonlitigasi, seperti mediasi, konseling psikologis, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial, dengan tujuan mencapai solusi yang bersifat damai dan berkelanjutan tanpa melalui proses pengadilan.

Secara operasional, penyelesaian konflik dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai segala bentuk upaya atau intervensi yang dilakukan oleh pihak

¹⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam mengakhiri atau meredakan pertikaian, pertentangan, atau ketegangan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Konflik yang dimaksud dapat berupa konflik antara pasangan suami istri, antara ayah ibu dan anak, atau di antara individu keluarga yang lain yang berpotensi menimbulkan kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun penelantaran.

Penyelesaian konflik mencakup berbagai pendekatan seperti: mediasi oleh tenaga konselor atau psikolog; pendampingan hukum oleh konsultan hukum; rehabilitasi psikososial terhadap korban; pelayanan rujukan ke instansi atau lembaga terkait; upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi keluarga harmonis.

Dengan demikian, indikator penyelesaian konflik dalam penelitian ini akan merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan UPTD PPA dalam menangani kasus konflik. Hasil dari upaya tersebut (misalnya rekonsiliasi, perlindungan terhadap korban, atau pemisahan aman), tingkat kepuasan dan keberfungsian keluarga setelah mendapat intervensi.

4. Keluarga

Keluarga dalam penelitian ini didefinisikan sebagai unit sosial paling dasar dalam masyarakat yang meliputi pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau hubungan keluarga lain, di mana mereka saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain. Hubungan ini menciptakan ikatan emosional, ekonomi, dan sosial yang langsung, yang menghasilkan berbagai bentuk interaksi sosial di

antara anggota keluarga.¹⁵

Definisi ini merujuk pada keluarga yang mengalami konflik internal, seperti: konflik antara pasangan suami istri (misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau perceraian), konflik antara orang tua dan anak (seperti pelanggaran hak anak, pengabaian, kekerasan verbal atau fisik), konflik antar anggota keluarga lain yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Dalam kerangka penelitian ini, keluarga yang menjadi objek intervensi UPTD PPA adalah mereka yang telah melaporkan atau dilaporkan mengalami konflik dan mendapatkan layanan dari UPTD PPA, baik dalam bentuk mediasi, pendampingan, maupun perlindungan hukum dan psikososial.

Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk memahami “keluarga” dalam penelitian ini mencakup: Adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi; Terjadinya konflik yang mengganggu fungsi keluarga; Keterlibatan dalam layanan penyelesaian konflik oleh UPTD PPA.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menentukan judul penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu dalam rangka menambah wawasan dan memandu penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Tesis oleh Muhammad Nursyafe'i Prodi Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN

¹⁵ Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto, “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,” *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (9 Februari 2021): 89, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/HJS/issue/view/958>.

Sunan Gunung Djati Bandung 2023 dengan judul “Analisis Penyelesaian Konflik KDRT Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat (Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*)” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian konflik KDRT di UPTD PPA, mengidentifikasi jenis-jenis konflik yang menjadi alasan perceraian, serta menganalisis upaya penyelesaiannya dalam kerangka *Maqashid Al-Syari’ah*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa UPTD PPA Jawa Barat menyelesaikan konflik melalui mediasi (terutama dengan pendekatan kaukus), pelaporan kepada pihak kepolisian, serta memberikan konseling intensif bagi anak-anak. Berbagai jenis konflik yang ditangani meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran, perdagangan manusia, serta eksploitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik KDRT merupakan kebutuhan *dharuriyat* yang wajib diselesaikan, sementara pelaporan dan pendampingan hukum dikategorikan sebagai *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

Penelitian ini menjadi landasan penting bagi peneliti dalam memahami peran UPTD PPA. Namun, ruang lingkupnya masih terbatas pada kasus KDRT dan belum menyentuh bentuk konflik keluarga lainnya, seperti konflik ekonomi, pola asuh anak, atau perselingkuhan. Selain itu, penelitian ini berfokus di wilayah Jawa Barat, sehingga belum mewakili konteks sosial-budaya di daerah lain seperti di Banjarmasin. Oleh karena itu, penelitian yang

akan peneliti teliti bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara lebih luas peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam penyelesaian berbagai bentuk konflik keluarga.¹⁶

2. Sebuah jurnal penelitian yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul “Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang)” ditulis oleh Lisdayanti, Elvira, dan Suhendar yang bertujuan menganalisis peran UPTD PPA berfungsi sebagai penyaluran kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menyediakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek kelembagaan dan peran administratif UPTD PPA, seperti pendampingan korban kekerasan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, serta psikoedukasi masyarakat. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan studi kasus pada P2TP2A Kabupaten Tangerang sebagai contoh implementasi konsep dekonsentrasi dalam pembentukan UPTD PPA.

Penelitian ini memiliki keterkaitan karena sama-sama membahas kontribusi UPTD PPA terhadap perlindungan perempuan dan anak. Namun, terdapat perbedaan ruang lingkup. Penelitian Lisdayanti dkk. lebih

¹⁶ Muhammad Nursyafe'i, “Analisis penyelesaian konflik KDRT di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat : Perspektif Maqashid Al-Syari'ah” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, t.t.), <https://digilib.uinsgd.ac.id/73525/>.

menekankan pada peran kelembagaan dalam perspektif hukum tata pemerintahan, sementara fokus penelitian penulis adalah pada bentuk-bentuk konflik keluarga secara lebih luas tidak hanya kekerasan, tetapi juga konflik ekonomi, pola asuh, dan hubungan antaranggota keluarga serta bagaimana UPTD PPA Banjarmasin berperan dalam mediasi, konseling, dan solusi penyelesaiannya.

Dengan membandingkan kedua penelitian tersebut, melihat adanya celah penelitian yang belum banyak dibahas, yaitu bagaimana peran UPTD PPA dalam menangani konflik keluarga non KDRT secara komprehensif dan kontekstual di wilayah Banjarmasin. Penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut serta memperluas pemahaman tentang fungsi UPTD PPA bukan hanya sebagai pelaksana mandat kelembagaan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dalam penyelesaian konflik keluarga di masyarakat.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chesa Syaqira Makmur (2021) dalam tesisnya berjudul “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Yogyakarta dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Anak pada Masa Pandemi Covid-19 serta Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga” yang bertujuan menganalisis fungsi UPTD PPA dalam

¹⁷ Lisdayanti, Suhendar, dan Elvira, “Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang),” *Jurnal Lex Specialis* 4, no. 2 (2023), <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/34534>.

menangani kasus kekerasan anak serta efeknya terhadap ketahanan keluarga.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendampingan psikologis dan hukum yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Yogyakarta dapat membantu memulihkan kondisi psikis anak korban kekerasan serta meningkatkan daya tahan keluarga dari aspek kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran aktif UPTD PPA memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pemulihan dan penguatan ketahanan keluarga pasca kekerasan.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada objek institusi yang diteliti, yaitu UPTD PPA, serta fokus pada keluarga sebagai lingkup dampak dari kekerasan atau konflik. Namun, perbedaan mencolok terlihat dari aspek fokus masalah. Penelitian Chesa lebih sempit karena terfokus pada kekerasan terhadap anak selama masa pandemi, sedangkan penelitian saya mencakup konflik keluarga secara lebih luas, tidak terbatas pada kekerasan anak, tetapi juga mencakup konflik relasi, ekonomi, dan peran dalam keluarga di luar situasi pandemi. Selain itu, penelitian yang akan diteliti menyoroti mekanisme penyelesaian konflik melalui layanan UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam konteks sosial dan budaya lokal, sementara Chesa lebih menekankan pada implikasi terhadap ketahanan keluarga pasca pendampingan.

Dari hasil penelitian terdahulu ini, peneliti memperoleh pemahaman bahwa UPTD PPA memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keluarga melalui layanan pendampingan, baik psikologis maupun hukum. Namun, peneliti juga mengidentifikasi adanya kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus membahas bagaimana UPTD PPA menangani konflik keluarga yang tidak hanya berbentuk kekerasan, serta bagaimana mereka menjalankan fungsi mediasi dan pemulihan secara menyeluruh di luar konteks pandemi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk menutupi celah ini dan memberi kontribusi hal baru.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan ini dan memberikan kontribusi baru, dengan mengembangkan perspektif penyelesaian konflik keluarga secara holistik dan kontekstual melalui studi kasus UPTD PPA Kota Banjarmasin. Dengan demikian, penelitian ini akan membangun dan memperluas cakupan kajian yang telah dilakukan oleh Chesa dan peneliti sebelumnya.¹⁸

4. Penelitian oleh Ayundasari R. Sarah (2023) yang berjudul “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak” yang bertujuan untuk mengevaluasi peran strategis UPTD PPA dalam

¹⁸ Budi Andayani dan Septiana Dwiputri Maharani, “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga” (Yogyakarta, Gajah Mada, 2021).

menanggulangi kekerasan yang terjadi pada anak Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa UPTD PPA menjalankan empat peran utama: sebagai regulator melalui landasan hukum lokal, sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana, prasarana, dan SDM, sebagai pelaksana layanan (pengaduan, rehabilitasi, dan pemulangan korban), serta sebagai koordinator melalui jaringan kerja sama lintas lembaga. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan seperti korban yang enggan terbuka dan keterbatasan SDM, serta upaya-upaya peningkatan kapasitas dan sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti, terdapat beberapa kesamaan penting, seperti fokus pada institusi UPTD PPA dan penggunaan pendekatan kualitatif. Kedua penelitian juga menyoroti peran penting UPTD PPA dalam memberi layanan perlindungan dan layanan bagi korban. Namun, perbedaannya terletak pada fokus masalah: penelitian Ayundasari terpusat pada kasus kekerasan terhadap anak di Sidoarjo, sedangkan penelitian yang akan diteliti mencakup konflik keluarga secara lebih luas di Kota Banjarmasin termasuk konflik dalam relasi suami istri, konflik ekonomi, dan konflik antar anggota keluarga yang tidak selalu berupa kekerasan fisik. Penelitian saya juga lebih menekankan pada penyelesaian konflik melalui pendekatan mediasi, edukasi, serta pendampingan hukum dan psikologis dalam konteks sosial budaya masyarakat lokal.

Dari penelitian Ayundasari dan beberapa studi sebelumnya, saya

memperoleh gambaran komprehensif bahwa UPTD PPA mempunyai peran utama dalam penanganan konflik keluarga dan anak. Namun demikian, terdapat celah penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu bagaimana UPTD PPA berperan dalam menyelesaikan konflik keluarga yang sifatnya tidak hanya kekerasan, tetapi juga ketegangan psikologis, perselisihan relasi, serta konflik peran dalam rumah tangga. Tesis saya akan mengisi celah ini dengan menganalisis mekanisme penyelesaian konflik secara menyeluruh, serta mengidentifikasi strategi UPTD PPA dalam membangun ketahanan dan keharmonisan keluarga melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di Kota Banjarmasin. Dengan demikian, penelitian ini akan memperluas kontribusi akademik dan praktik dalam penguatan peran UPTD PPA secara lebih strategis dan kontekstual.¹⁹

5. Penelitian Risqa Aulia Rahmah Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Magister Ilmu Pemerintahan Banjarmasin 2024 bertujuan untuk mengetahui dan memahami kualitas pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan di Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskripsi kualitatif dengan cara pengumpulan informasi yang meliputi wawancara, observasi

¹⁹ Sarah Ayundasari Rudhito, “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak” (Surabaya, Universitas Bhayangkara, 2023).

dan dokumen. Hasil penelitian dievaluasi menggunakan 5 aspek kualitas pelayanan, yaitu *tangible*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*. Temuan utama mengindikasikan bahwa layanan UPTD PPA sudah lumayan memuaskan, tetapi masih menghadapi sejumlah kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, minimnya fasilitas, dan kolaborasi antara petugas dengan klien.

Jika dibandingkan dengan penelitian tesis saya, terdapat beberapa kesamaan mendasar, seperti kesamaan lokasi (sama-sama di Kota Banjarmasin), pendekatan kualitatif, serta fokus pada peran dan kualitas layanan UPTD PPA. Namun, terdapat pula perbedaan signifikan dalam ruang lingkup kajian. Penelitian Risqa lebih berfokus pada pelayanan terhadap korban KDRT, khususnya perempuan, dengan pendekatan pelayanan publik dan dimensi kualitas pelayanan. Sementara itu, penelitian yang akan diteliti mengangkat tema yang lebih luas, yaitu penyelesaian konflik keluarga, yang tidak terbatas pada kasus KDRT saja, melainkan juga mencakup konflik antara pasangan, konflik antar anggota keluarga, serta pendekatan mediasi, edukasi, dan psikososial yang dilakukan oleh UPTD PPA.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah dianalisis, termasuk Risqa Aulia Rahmah, dapat disintesis bahwa UPTD PPA memiliki peran strategis dalam penanganan isu-isu keluarga, baik dalam bentuk kekerasan maupun konflik nonkekerasan. Tren yang muncul adalah adanya pengakuan terhadap peran UPTD PPA sebagai pelayan publik yang membutuhkan SDM

dan sarana-prasarana yang kuat, serta pentingnya koordinasi lintas sektor. Namun demikian, terdapat kesenjangan dalam penelitian terdahulu, yaitu belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana UPTD PPA menangani konflik keluarga secara menyeluruh—bukan hanya kasus kekerasan, tetapi juga konflik psikologis, ekonomi, peran, dan relasi interpersonal dalam keluarga. Tesis saya akan mengisi celah tersebut dengan memberikan kontribusi baru berupa analisis mendalam tentang pola, strategi, dan efektivitas peran UPTD PPA dalam menyelesaikan konflik keluarga secara komprehensif, kontekstual, dan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya membangun dari temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas cakupan substansi dalam penguatan lembaga perlindungan sosial berbasis keluarga di Kota Banjarmasin.²⁰

G. Sistematika Penelitian

1. BAB I Pendahuluan: Menjelaskan secara umum alasan dilakukannya penelitian, termasuk latar belakang permasalahan yang melandasinya, perumusan persoalan yang hendak dijawab, serta tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Selain itu, bagian ini juga memaparkan manfaat yang diharapkan, baik bagi pembaca maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penjelasan mengenai istilah-istilah kunci dalam penelitian

²⁰ Risqa Aulia Rahmah dan Setia Budhi, “Kualitas Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd Ppa) Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Di Kota Banjarmasin,” *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 2 (2024), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/16134>.

(definisi operasional), ulasan terhadap studi-studi sebelumnya yang relevan, serta gambaran sistematika penulisan laporan penelitian turut disampaikan di bagian ini.

2. BAB II Kajian Teori: Membahas tinjauan terhadap teori yang relevan dengan penelitian, termasuk Teori hukum positif, Teori *Maqashid Syariah*, Teori Peran, Teori Penyelesaian Konflik. dan tinjauan teoritis yaitu tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
3. BAB III Metode Penelitian: Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang dilakukan, serta teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan terkait Peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam Penyelesaian Konflik Keluarga. Pembahasan dalam bab ini mencakup analisis terhadap bentuk dan implementasi peran UPTD PPA dalam menangani konflik keluarga, termasuk metode dan pendekatan yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menguraikan kendala-kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya, serta strategi optimalisasi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran UPTD PPA dalam penyelesaian konflik keluarga secara nonlitigasi, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
5. BAB V Penutup: Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis

yang memuat dua sub bab utama. Sub bab pertama berisi simpulan yang merangkum pokok-pokok hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan sub bab kedua memuat saran atau rekomendasi yang disusun sebagai masukan konstruktif guna memperkuat temuan penelitian serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan, praktik penyelesaian konflik keluarga, maupun penelitian selanjutnya.